KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fadli Gerilya Pasca Reses - Usulan Pansus TKA Baru Diteken 8 Orang
Tanggal : Jumat, 04 Mei 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Fadli Gerilya Pasca Reses

Usulan Pansus TKA Baru Diteken 8 Orang

USULAN pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ternyata belum banyak direspons para politisi Senayan. Sampai kemarin, yang menandatangani usulan tersebut baru delapan orang.

Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sebagai inisiator usulan tersebut, tetap pede. Dia yakin, saat memasuki masa persidangan sebelum Ramadan nanti, yang ikut meneken usulan itu akan bertambah signifikan, sehingga memenuhi syarat untuk dibawa di Rapat Paripurna.

"Sekarang kan masih dalam masa reses, belum terkumpul. Namun, saya yakin akan terpenuhi syarat minimal 25 orang dari lebih dari satu fraksi," ujar pentolan Partai Gerindra ini dalam acara Dialektika Demokrasi bertema "Adu Kuat Pansus Angket TKA," di Ruang Pers Parlemen, Senayan, kemarin.

Saat ini, usulan Pansus tersebut sudah ditandatangani oleh para anggota Dewan dari dua fraksi, yaitu Gerindra dan PKS. Setelah reses nanti, Fadli dan anggota Dewan yang sehaluan dengannya akan menyebarkan lembaran usulan itu untuk ditandatangani para anggota lain. Fadli yakin, anggota DPR dari fraksi lain akan turut menandatangani usulan tersebut.

Fadli merasa, pembentukan Pansus itu juga hal yang wajar bagi DPR dalam menggunakan haknya. Menurutnya, Pansus Hak Angket adalah solusi untuk menyelidiki masalah isu membanjirnya TKA asal China ke Indonesia selama ini.

"Ini bukan persoalan oposisi atau dukungan ke pemerintah. Ini adalah persoalan bangsa yang menyangkut kedaulatan Indonesia, yang tidak boleh *regret* (menyesal) di satu hari nanti karena tidak mengoreksi ini," ucapnya.

"Jangan sampai seperti negara lain, begitu banyak masuk orang dan kemudian menjadi masalah sosial, budaya, dan politik serta bisa memicu konflik yang tidak perlu," tambahnya. Namun dia tidak menjelaskan negara lain apa yang dimaksudnya.

Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Golkar DPR Ichsan Firdaus menyatakan tidak setuju dibentuk Pansus Hak Angket TKA. Menurutnya, sesuai hasil rapat Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, pihaknya melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan TKA sejak datang hingga bekerja di Indonesia.

"Fraksi Partai Golkar menolak Pansus Angket. Sebab, yang perlu adalah memperkuat pengawasan dari pusat hingga daerah," jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Dia mengakui, ada permasalahan hadirnya TKA di Tanah Air. Komisi IX pun telah mendorong dibentuk Satgas Pengawasan TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Di Komisi IX akan membentuk Tim Pengawas TKA. Jadi, tidak perlu sampai ke Pansus.

Dia pun menegaskan, jika pun jumlah yang menandatangani usulan tersebut mencukupi, belum tentu Pansus akan goal. Sebab, keputusan pembentukan Pansus akan ditentukan di Rapat Paripurna.

"Pansus itu syarat usulan pembentukan kan minimal dua fraksi atau yang terdiri dari 25 orang. Jadi, kalau Pak Fadli Zon mau galangm silakan saja. Nanti di Rapat Paripurna kan diputuskan secara keseluruhan, apakah kemudian Pansus bisa ditetapkan atau tidak," ucapnya. ■ ONI